

ANALISIS SEBARAN KEMISKINAN DI KABUPATEN PANDEGLANG

Etty Puji Lestari^{1*}, Arief Rahman Susila

¹Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

²Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

*ettypl@ut.ac.id

ABSTRAK

Pada saat ini permasalahan utama yang harus dihadapi akibat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mengenai isu kemiskinan, pengangguran, rendahnya mutu pelayanan publik dan kesenjangan pembangunan antardaerah. Kawasan perdesaan sebagai basis utama dan bagian terbesar dalam wilayah Kabupaten Pandeglang, sangat membutuhkan percepatan pembangunan secara bertahap, proporsional dan berkelanjutan. Berbagai keterbatasan kapasitas dan ketertinggalan kondisi wilayah yang terdapat di perdesaan, senantiasa dihadapkan pada isu disparitas regional yang bersifat makro bahwa Kabupaten Pandeglang adalah salah satu Daerah Tertinggal di Indonesia. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebutuhan mendasar atas ketersediaan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin keseimbangan antar sektor dan regional, yang berorientasi kepada pembangunan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu: GIS (Geographic Information System), Analisis Hierarki Proses (AHP) dan analisis deskriptif. Dari hasil pemetaan analisis spasial diketahui bahwa sebaran penduduk miskin dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pandeglang cenderung bersifat mengelompok (cluster). Dan program pengentasan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah belum menekankan pada strategi penanganan yang bersifat kewilayahan, dengan pihak yang bertanggung jawab adalah pemerintah.

Kata kunci: Kemiskinan, persebaran kemiskinan, kebijakan pengentasan kemiskinan, Kabupaten Pandeglang

ABSTRACT

The problem of this study comes from the current issues related to the poverty, unemployment, inadequate quality of public services and the gap between regions due to the implementation of decentralization and regional autonomy. Rural areas as the main base and the largest in the region Pandeglang, in desperate need of accelerated development in stages, proportionate and sustainable development. Various capacity constraints and backwardness condition contained rural areas, constantly faced with the issue of regional disparities at the macro level in Pandeglang Distric. This certainly has implications for basic needs for the availability of a system of regional development planning to ensure a balance between sectors and regions, which are oriented to rural development. The study aims to analyze the pattern of spatial distribution of poverty in Pandeglang. Descriptive of visual-spatial analysis, Analyze Hierarki Process (AHP), and descriptive analysis are undertaken. The results shows that the population distribution and the poverty density tend to form clustered patterns (poverty pockets). This study suggest to align the pockets of poverty to the local communities through the regional policies undertaken by the government.

Keywords: Poverty, the poverty distribution, regional policies, Pandeglang Regency, pocket of poverty

PENDAHULUAN

Pada saat ini permasalahan utama yang harus dihadapi akibat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah mengenai isu kemiskinan, pengangguran, rendahnya mutu pelayanan publik dan kesenjangan antardaerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan terjadi di provinsi dan kabupaten kota yang baru diantaranya adalah kesenjangan struktural akibat aktivitas perekonomian yang terlalu bertumpu pada sektor-sektor tertentu (biasanya sektor primer; pertanian tradisional), keterbatasan sumber daya yang berimplikasi pada tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang berdampak pada indeks pembangunan manusia serta jumlah dan kualitas infrastruktur yang buruk karena tidak ditunjang oleh alokasi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemeliharaan (Rusdiyanto, 2007).

Kawasan perdesaan sebagai basis utama dan bagian terbesar dalam wilayah Kabupaten Pandeglang, sangat membutuhkan percepatan pembangunan secara bertahap, proporsional dan berkelanjutan. Berbagai keterbatasan kapasitas dan ketertinggalan kondisi wilayah yang terdapat di perdesaan, senantiasa dihadapkan pada isu disparitas regional yang bersifat makro bahwa Kabupaten Pandeglang adalah salah satu Daerah Tertinggal di Indonesia. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebutuhan mendasar atas ketersediaan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin keseimbangan antar sektor dan regional, yang berorientasi kepada pembangunan perdesaan. Melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang, yang sampai saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Peran pemerintah daerah sebagai pihak pembuat kebijakan harus jeli untuk mampu melihat potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang. Kebijakan dan rencana baik jangka panjang atau pendek yang diambil harus lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam RPJM Provinsi Banten tahun 2007-2012 salah satu program prioritas yaitu penanggulangan kemiskinan, untuk wilayah yang ada di Banten Selatan (Lebak dan Pandeglang) lebih besar persentase kemiskinan dari total persentase kemiskinan Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang semenjak krisis sampai otonomi daerah tingkat kemiskinan cenderung perubahan tiap tahun tidak terlalu banyak berubah, sehingga dapat dikatakan berlakunya otonomi daerah belum menunjukkan arah yang semakin membaik bagi Banten Selatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi harus didorong untuk mencapai kesejahteraan penduduk serta mengurangi kesenjangan yang terjadi antara Kabupaten Pandeglang dengan wilayah sekitarnya terutama wilayah Jabotabek dan wilayah Banten bagian utara. Dalam menelaah kebijakan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan, perlu terlebih dahulu diperhatikan faktor-

faktor penyebab kemiskinan atau dalam analisis kemiskinan disebut determinan kemiskinan. Kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi pada program pengentasan kemiskinan sudah seharusnya didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan tersebut. Faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik makro, sektor, komunitas, rumah tangga, dan individu (World Bank, 2002). Selain itu agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran, diharapkan pemerintah mampu melihat masalah kemiskinan secara kewilayahan. Dengan demikian perlakuan dalam penanganan kemiskinan dapat didasarkan pada karakteristik kemiskinan tiap wilayah. Artikel ini akan menganalisis pola spasial kemiskinan di Kabupaten pandeglang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Pandeglang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersifat sekunder terdiri dari data sosial seperti jumlah penduduk miskin, luas wilayah, kepadatan penduduk, dan semuanya diperoleh dalam data PODES. Selain itu, dibutuhkan data spasial seperti peta administrasi Kabupaten Pandeglang. Jenis data yang ketiga adalah data kelembagaan yang diperoleh secara sekunder dan primer.

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini digunakan metode Sistem Informasi Geografis (*Geographic Information System/GIS*) yang selanjutnya akan disebut SIG merupakan sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. Data yang akan diolah pada SIG merupakan data spasial yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu, sebagai dasar referensinya. Dalam analisis SIG ini dimaksudkan untuk melihat pola sebaran kemiskinan yang ada di Kabupaten Pandeglang. Setelah diketahui hasil analisis visual untuk variabel jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk miskin, langkah selanjutnya adalah melihat prioritas desa dengan jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk miskin tinggi. Pembagian kelas dalam analisis ini ditunjukkan oleh Tabel 1 berikut:




Tabel 1. Pembagian Kelas Variabel

Jumlah Penduduk Miskin (%)		Tingkat Kepadatan Penduduk Miskin	
Kode	Kelas	Kode	Kelas
J1	Sedikit	K1	Rendah
J2	Sedang	K2	Sedang
J3	Banyak	K3	Tinggi

Penentuan prioritas ini didasarkan pada matriks berikut ini:

		Tingkat Kepadatan Penduduk Miskin			
		KELAS	RENDAH (K 1)	SEDANG (K 2)	TINGGI (K 3)
Jumlah Penduduk Miskin	SEDIKIT (J 1)	J1 K1	J1 K2	J1 K3	
	1	2	3		
	SEDANG (J 2)	J2 K1	J2 K2	J2 K3	
4	5	6			
BANYAK (J 3)	J3 K1	J3 K2	J3 K3		
7	8	9			

Keterangan :

-  : Prioritas I (J3 K3)
-  : Prioritas II (J2 K5, J2 K3, J3 K2)
-  : Prioritas III (J1 K2, J1 K3, J2 K1, J3 K1)

Pendekatan lain yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk melihat bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang yang tertuang dalam RPJMD, RPJPD, dan RTRW dan membandingkan pendapat stakeholder yang ada di Kabupaten Pandeglang mengenai bentuk kebijakan penanganan masalah kemiskinan dengan analisis AHP (Analisis Hirarki Proses).

HASIL DAN PEMBAHASAN

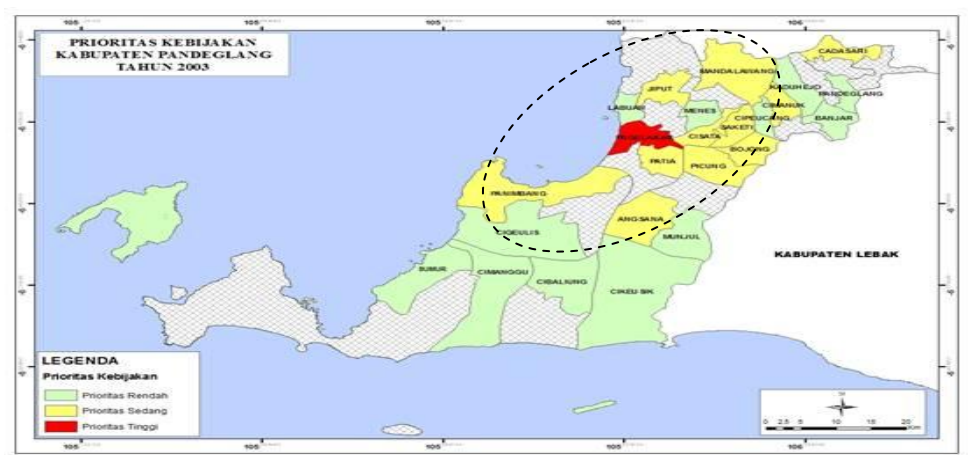
Analisis Visual Spasial Deskriptif

Hasil overlay penggolongan kategori pembagian kelas kemiskinan kecamatan berdasarkan jumlah penduduk miskin dan kepadatan penduduk miskin tahun 2000, 2003, 2005, 2008, dan 2011. Pada tahun 2000 tidak terdapat kelompok kecamatan yang masuk dalam prioritas tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh pemerintah Pandeglang bisa diaplikasikan kepada semua wilayah kecamatan tanpa terkecuali. Karena pada tahun 2000 mayoritas berada pada prioritas rendah. Klasifikasi kategori untuk tahun 2000 ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



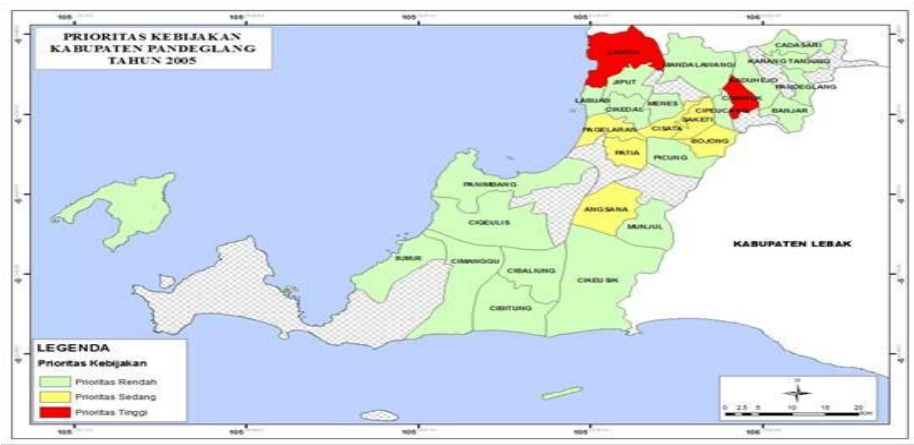
Gambar 1. Prioritas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2000

Sedangkan pada tahun 2003 terdapat sedikit perubahan. Yaitu munculnya wilayah kecamatan yang masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan tinggi, atau terdapat persentase jumlah penduduk miskin dan tingkat kepadatan penduduk miskin tinggi. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pagelaran. Pada tahun 2003 berada pada prioritas tinggi. Klasifikasi kategori untuk tahun 2003 ditunjukkan pada Gambar 2 berikut:



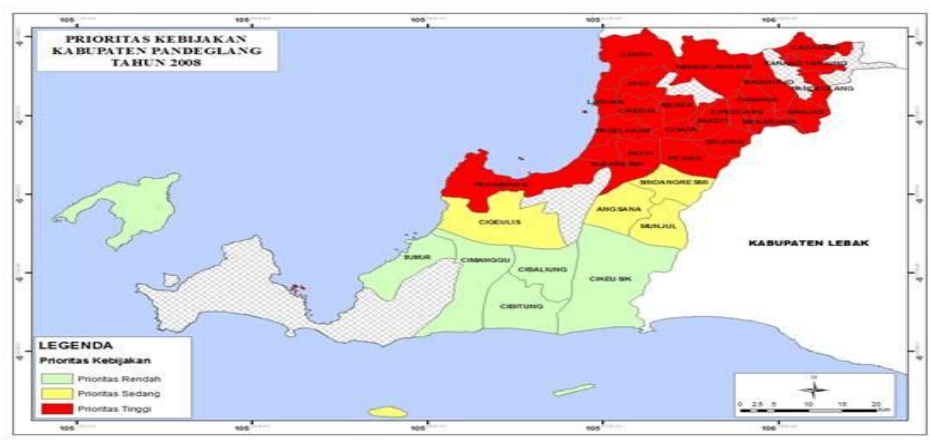
Gambar 2. Prioritas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2003

Pada tahun 2005, merupakan tahun yang paling bagus. Jumlah kecamatan yang menjadi target prioritas kemiskinan tinggi hanya ada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Carita dan Cimanuk. Sedangkan mayoritas kecamatan berada pada kelompok prioritas rendah, atau bisa dikatakan jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan. Target dan kondisi seperti ini yang sangat diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Pandeglang.



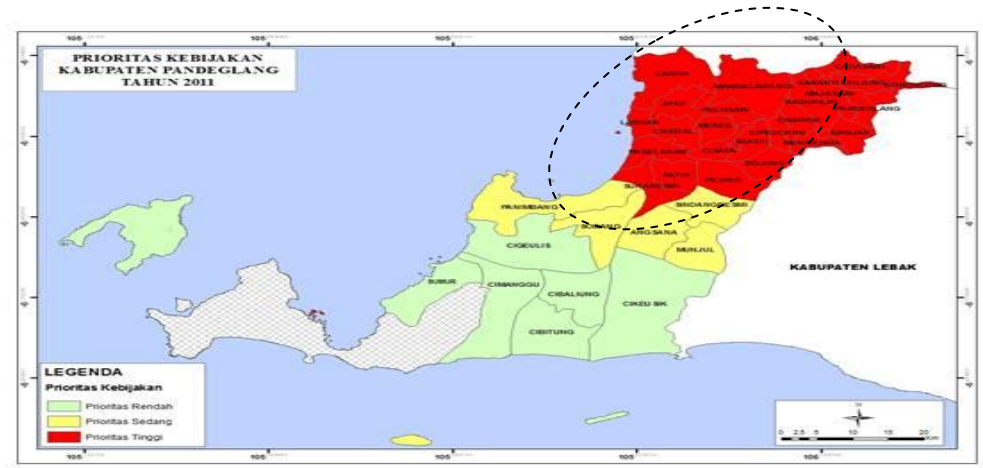
Gambar 3. Prioritas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2005

Siklus perubahan dalam hal konfigurasi daerah dengan prioritas kebijakan rendah sedang dan tinggi harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat Pandeglang. Khusus untuk tahun 2008 dan 2011, mayoritas kecamatan berada pada kelompok prioritas tinggi, hal ini harus menjadi pertanyaan pemerintah daerah selaku pemegang hak regulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.



Gambar 4. Prioritas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2008

Pengelompokan kecamatan dengan prioritas penanggulangan kemiskinan tinggi terjadi pada tahun 2008.



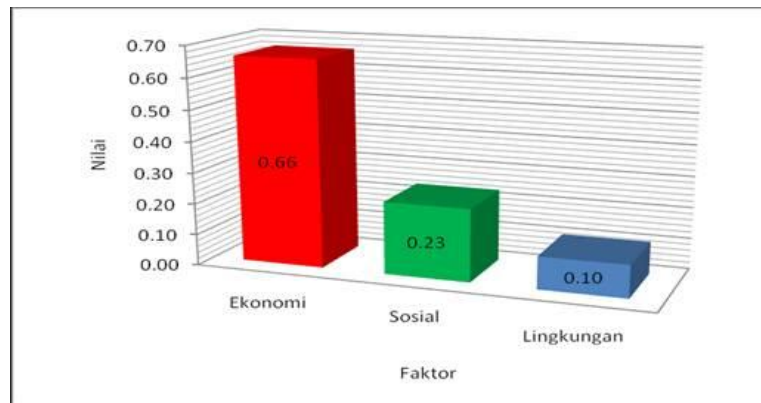
Gambar 4. Prioritas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2011

Khusus untuk tahun 2008 dan 2011, mayoritas kecamatan berada pada kelompok prioritas ringgi, hal ini harus menjadi pertanyaan pemerintah daerah selaku pemegang hak regulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah harus mengkaji ulang apakah jenis kebijakan yang diterapkan sudah tepat atau belum. Wilayah Pandeglang bagian utara mempunyai tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Dari hasil Semiloka PNPM Perdesaan dan Perkotaan terungkap bahwa tingkat kemiskinan Kecamatan Pandeglang sebagai daerah paling padat penduduk lebih dari 40%. Hal ini bisa dikatakan bahwa Kecamatan Pandeglang mempunyai daya tarik bagi penduduk yang ada di Kabupaten Pandeglang untuk pergi kesana. Selayaknya suatu pusat kegiatan dan administrasi maka permasalahan yang dihadapi akan sangat kompleks. Dengan adanya pergerakan masyarakat (khususnya masyarakat miskin) ke kawasan Kecamatan Pandeglang maka tingkat kepadatan penduduk miskin akan menjadi tinggi. Selain itu juga muncul kantong kantong kemiskinan di desa-desa. Kantong-kantong kemiskinan ini harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah untuk segera ditangani.

Kebijakan Pemerintah Untuk Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan analisis dampak manfaat berlakunya otonomi daerah untuk pengentasan kemiskinan diperoleh bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan (0,662), diikuti oleh faktor sosial (0,23), dan faktor lingkungan (0,10).



Gambar 5. Hasil Analisis Persepsi Gabungan AHP untuk Kebijakan Pengentasan Kemiskinan.

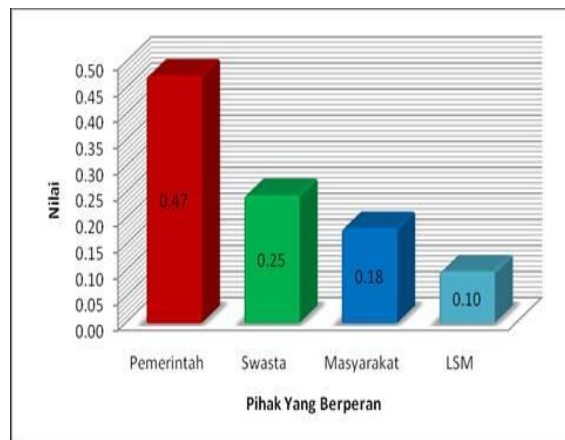
Kriteria yang menjadi prioritas utama terhadap dampak manfaat pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan untuk aspek ekonomi adalah peningkatan pendapatan masyarakat (0,462). Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan juga Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan akan meningkatkan ekonomi wilayah. Setiap daerah memiliki kewenangan dalam rangka peningkatan dan pengoptimalan terhadap potensi daerah yang dimiliki. Sehingga tujuan akhir dari kebijakan ekonomi yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Dampak manfaat dari aspek sosial yang dominan adalah peningkatan penyerapan tenaga kerja (0,773). Kebijakan otonomi daerah sasaran utamanya dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Konsekuensi yang muncul adalah sejauh manakah pemanfaatan potensi daerah yang ada mampu memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan otonomi itu sendiri, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dengan peningkatan terhadap akses pelayanan akan memicu investasi swasta di daerah. Dengan peningkatan investasi akan memicu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Akan tetapi dalam jangka panjang ini akan membawa dampak negatif terhadap lingkungan.

Manfaat lain bagi dari aspek lingkungan yang dominan adalah konservasi lingkungan (0,730). Masyarakat lebih berharap faktor ini lebih diutamakan karena terdapat wilayah hutan lindung yang sudah rusak karena kegiatan penambangan dan ini menjadi prioritas dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Selain itu, wilayah Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah berkarakteristik pedesaan dengan struktur perekonomian yang mengandalkan sektor primer yaitu pertanian khususnya perkebunan sebagai subsektor yang sangat diandalkan.

Berdasarkan hasil dari pembobotan pendapat gabungan responden perumus kebijakan menunjukkan bahwa stakeholders yang bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat pelaksanaan kebijakan bagi pengentasan kemiskinan adalah pemerintah (0,47), diikuti oleh swasta

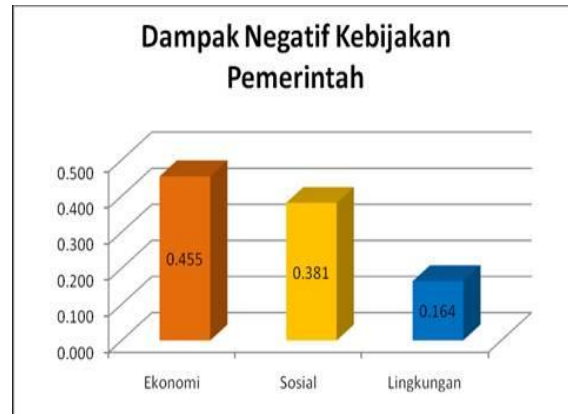
(0,25), masyarakat (0,18), dan terakhir adalah LSM (0,10). Hal ini terjadi pada semua indikator dari sisi stakeholders yang berperan dalam pengoptimalan otonomi daerah.



Gambar 6. Hasil Analisis Persepsi Stakeholders Kebijakan Pengentasan Kemiskinan.

Tata pemerintahan memiliki tiga pilar yang dominan, yaitu pemerintahan (state), swasta (private sector), dan masyarakat (society). Ketiga domain tersebut berada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintah lebih banyak berperan sebagai pembuat kebijakan, pengendali dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berperan dan menjadi penggerak dalam aktifitas bidang ekonomi sedangkan masyarakat yang didalamnya termasuk LSM merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintah maupun swasta. Pemerintah sebagai pihak yang dominan, harus mampu bekerja sama dengan swasta dan masyarakat untuk mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

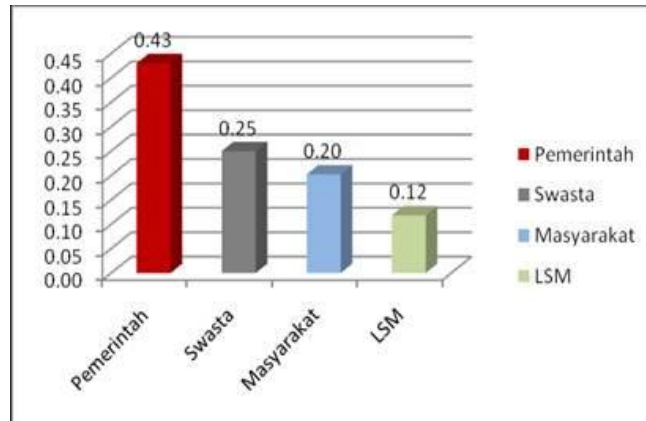
Faktor yang paling berpengaruh dari dampak negatif kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Pandeglang adalah faktor ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kriteria komponen dampak yang paling dirasakan menurut gabungan responden adalah pendapatan masyarakat yang berkurang dengan nilai bobot (0,839). Hal ini mungkin disebabkan oleh belum meratanya pembangunan dan pemerataan distribusi pendapatan. Kesenjangan antara Banten Utara dan Selatan masih sangat lebar. Mayoritas penduduk yang masih bekerja pada sektor pertanian semakin terpuruk dan semakin berat beban hidupnya, apalagi dengan adanya kenaikan barang kebutuhan hidup.



Gambar 7. Hasil Analisis Persepsi Dampak Negatif Kebijakan Pemerintah.

Menyadari akan melemahnya kondisi perekonomian di Kabupaten Pandeglang, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia dan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk mengejar ketertinggalannya dari daerah lain. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten Pandeglang lebih berorientasi pada pembangunan sarana prasarana serta mengembangkan jiwa kewirausahaan agar dapat mengelola segala sumber daya yang ada. Selain itu pula dalam perencanaan pembangunan wilayah perlu melibatkan masyarakat secara aktif atau sering dikenal dengan istilah "bottom up" (partisipatif).

Adapun faktor sosial dampak negatif/kerugian yang sangat dirasakan dari gabungan responden adalah perubahan pola hidup (0,789) yang diakibatkan banyaknya masyarakat mulai mengenal diskotik, pergaulan bebas, fast food, internet, facebook, dsb. Sedangkan yang paling besar dari aspek lingkungan yang dirasakan Kabupaten Pandeglang adalah kerusakan tata ruang sebesar (0,739), ini diakibatkan oleh adanya pembukaan lahan baru, baik untuk pemukiman atau pertanian. Pembukaan lahan baru tersebut terkadang berada pada kawasan hutan lindung. Stakeholder yang paling berperan terhadap munculnya dampak negatif di Kabupaten Pandeglang adalah pemerintah (0,43), diikuti oleh sektor swasta (0,25), kemudian sektor masyarakat (0,20), dan LSM (0,12).



Gambar 8. Hasil Analisis Persepsi Dampak Negatif Pelaksanaan Otonomi Daerah

Dari hasil analisis AHP diketahui bahwa faktor yang paling dominan diharapkan oleh masyarakat adalah pengembangan dari sisi ekonomi. Hal ini bisa dalam bentuk perbaikan dan penambahan sarana prasarana jalan raya, pasar, rumah sakit, sekolah, dsb. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung segala bentuk kegiatan perekonomian dari masyarakat. Pihak yang diharapkan berperan utama dalam hal ini adalah pemerintah sebagai pihak pembuat regulasi dan dana, bekerja sama dengan pihak swasta dan masyarakat. Diharapkan dengan adanya kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat pembangunan akan berhasil dilaksanakan dan tujuan utama yaitu pengurangan jumlah masyarakat miskin akan terjadi.

Bentuk Kebijakan Pemerintah

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tenteram serta memperluas pilihan yang dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat dan harga diri.

Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain, dunia usaha swasta berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan serta masyarakat memiliki peran dalam penciptaan

interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Permasalahan dasar yang muncul selama proses pembangunan daerah selama ini, berimplikasi pada masa depan. Jika permasalahan dasar itu belum dapat diatasi sehingga mengakibatkan keberlanjutan secara terus menerus konsekuensinya akan terjadi proses komplikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Keseluruhan upaya untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera akan berdiri di atas pondasi yang rapuh, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan dan peluruhan martabat warga masyarakat

Bentuk kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam usaha untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang terjadi:

- a. Meningkatnya investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata.
- b. Tersedianya pengklasteran pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.
- c. Meningkatnya ketahanan pangan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
- d. Tertanggulangnya kemiskinan dan pengangguran yang diprioritaskan pada kantong-kantong kemiskinan dengan memprioritaskan pemberdayaan masyarakat.
- e. Terlaksananya Intensifikasi, eksplorasi dan pendayagunaan potensi-potensi Sumber Daya Alam dan pemanfaatan sumber energi dengan memperhatikan keberlanjutan serta kelestarian lingkungan hidup
- f. Meningkatnya pemberdayaan koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah
- g. Peningkatan kualitas SDM, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, memepromudah akses sarana kesehatan
- h. Perbaikan sarana dan prasarana publik

PENUTUP

Dari hasil pemetaan analisis spasial pada tahun 2000, 2003, dan 2006 sebaran penduduk miskin dan kepadatan penduduk di Kabupaten Pandeglang cenderung bersifat mengelompok (*cluster*). Berdasarkan analisis dampak manfaat berlakunya otonomi daerah untuk pengentasan kemiskinan diperoleh bahwa faktor ekonomi adalah faktor yang paling dominan diikuti oleh faktor sosial dan lingkungan (0,10). Dan *stakeholders* yang bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat pelaksanaan kebijakan bagi pengentasan kemiskinan adalah pemerintah diikuti oleh swasta, masyarakat dan LSM. Hasil analisis spasial, analisis deskripsi, dan AHP diketahui bahwa program pengentasan kemiskinan yang diambil oleh pemerintah belum menekankan pada strategi penanganan yang bersifat kewilayahan. Dengan demikian pemerintah harus lebih memprioritaskan program penanggulangan kemiskinan yang didasarkan atas karakteristik masing-masing wilayah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Terbuka yang telah memberikan pendanaan penelitian melalui skema Penelitian Fundamental Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2012. Pandeglang Dalam Angka. Badan Pusat Statistik kabupaten Pandeglang.
- RPJMD Kabupaten Pandeglang 2011-2016
- World Bank Institute. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. Edisi Terjemahan. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Rusdiyanto, Arifin dkk. 2007. Pola Kesenjangan Kesejahteraan Masyarakat Antardaerah. Bappenas. Jakarta.